PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Komang Wididarma[1]
Made Jember[2]

[1,2]Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: darmawidi14@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan dapat diturunkan dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti melalui peningkatan IPM, PAD, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis pengaruh langsung indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, 2) menganalisis pengaruh langsung indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, 3) menganalisis pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh tidak langsung indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis jalur (*path analysis*).. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 72 titik pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, 2) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, 3) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, 4) indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, 5) pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel mediasi antara indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, dan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kata Kunci: indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan.

ABSTRACT

The purpose of this study is 1) to analyze the direct effect of the human development index and original income on the economic growth, 2) analyze the direct effect of the human development index, regional original income, and economic growth on poverty, 3) analyzing economic growth mediates the indirect effect of the human development index and local original income on district / city poverty. The analysis technique used in this research is path analysis. The data used are secondary data with 72 observation points. The results showed that 1) the human development index had a positive and significant effect on the economic growth of districts / cities in the Province of Bali, 2) local original income had no effect on the economic growth of districts / cities in the Province of Bali, 3) economic growth had no effect on district poverty / cities in Bali Province, 4) index of human development and regional original income has a negative and significant impact on district / city poverty in Bali Province, 5) economic growth is not a mediating variable between the index of human development, regional original income, and district poverty city in the Province of Bali.

***Keywords**: human development index, local original income, economic growth, poverty.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mengakibatkan peningkatan pendapatan riil per kapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang yang diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan (Adipuryanti, 2015). Menurut Arsyad (2010) Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses yang saling berkaitan dan berpengaruh antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi yang dapat dilihat dan dianalisis, baik secara nasional maupun secara regional.

Pembagunan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek (Suliswanto, 2010). Pembangunan ekonomi daerah adalah kerja sama yang dibangun antara pemerintah dan sektor swasta guna memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Pembangunan ekonomi daerah tidak lepas dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang N0. 25 tahun 1999, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya atau yang seering disebut otonomi daerah (Suparmoko, 2002:4). Salah satu alasan dibentuknya otonomi daerah adalah daerah dapat memaksimalkan potens daerahnya sehingga pembangunan di pusat dapat berjalan seimbang dengan pembangunan di daerah.

Maipita (2014) mengatakan bahwa tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berkaitan dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin dapat diartikan mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada dalam kategori sejahtera. Masyarakat miskin juga dapat dikatakan mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kesehatan yang buruk. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu target kebijakan pembangunan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil.

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan (Vincent, 2009). Penurunan kemiskinan dapat dilakukan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli. Meskipun demikian, kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Menurut data BPS (2018), kemiskinan di Provinsi Bali mengalami fluktuasi atau besar kecilnya penurunan maupun peningkatan pada persentase penduduk miskin di Provinsi Bali. Terlihat pada Gambar 1.1 yang menunjukkan persentase penduduk miskin Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota.

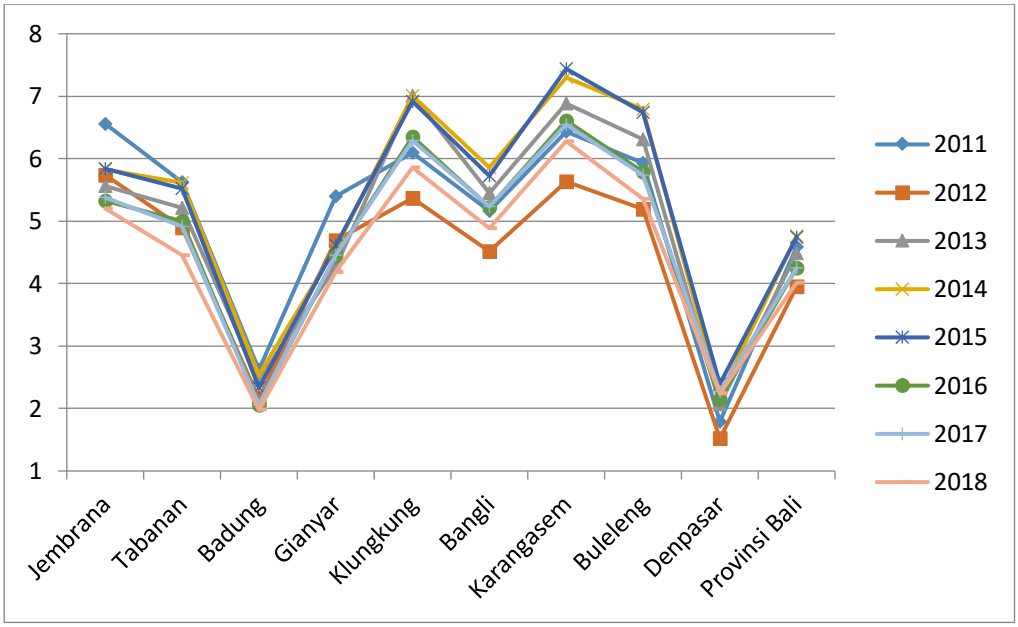

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2018. (Diakses Tanggal 14 Desember 2019)*

Gambar 1. Data Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen) di Provinsi Bali Tahun 2011-2018

Gambar 1 memperlihatkan persentase penduduk miskin di Provinsi Bali dari tahun 2011-2018 mengalami fluktuasi, dari data tersebut persentase penduduk miskin tertinggi berada pada tahun 2014 yaitu 4,76 persen. Namun, jika dibandingkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali dengan hasil terendah terdapat pada tahun 2012 yaitu 3,95 persen. Hal ini menjadi perhatian khusus, dikarenakan Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama delapan tahun terakhir. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah adalah mewujudkan lambatnya laju penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali agar tidak mengalami flluktuasi.

Meningkatnya kemiskinan di Bali, dapat disebabkan juga karena adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi. Santosa (2013) mengatakan bahwa untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dapat dilakukan dengan peningkatan pendapatan, walaupun tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam suatu kehidupan ekonomi setiap negara di dunia. Dalam meningkatkan pertumbuhan suatu perekonomian, sering tidak bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Kristyanto, Visi Saujaningati, 2018). Provinsi Bali mempunyai struktur perekonomian yang sangat unik dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Keunikan ini disebabkan karena sebagian besar sumber penghidupan masyarakat bersumber dari sektor tersier (pariwisata) mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan nilai tambah sedangkan sektor lainnya hanya berperan sebagai sektor pendukung (BPS, 2003).

Sumber-sumber dan potensi ekonomi yang dimiliki setiap wilayah menjadi penentu kemajuan pembangunan di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Kabupaten/Kota yang kaya sumber atau potensi ekonomi akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang lebih cepat dibandingkan Kabupaten/Kota yang tergolong dalam daerah miskin. Kabupaten Badung yang memiliki potensi lebih besar dalam pengembangan kegiatan pariwisata, Kabupaten Gianyar yang memiliki potensi dalam kegiatan industri kecil, dan Kabupaten Tabanan dalam sektor pertanian. Sementara itu, Kabupaten Karangasem atau Kabupaten Bangli memiliki sumber atau potensi ekonomi yang relatif terbatas sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonominya.

Menurut Dollar dan Kraay (2002), bahwa pertumbuhan ekonomi sangat memegang peranan penting dalam mendorong pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan harus hidup berdampingan dan merencanakan, mencari distribusi pekerjaan yang adil dan berbagi hasil pembangunan (Suryahadi, 2012). Berhasil

tidaknya pembangunan ditentukan oleh beberapa indikator, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi (Samputra, 2019). Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan di berbagai sektor (Suartha & Yasa, 2017). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi di peroleh dari laju pertumbuhan Produk Domestik Rregional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (Todaro, 2008). Laju pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi terhitung dari tahun 2011-2018 (BPS, 2018). Peningkatan pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali menjadi perhatian khusus dikarenakan tingkat kemiskinan Provinsi Bali masih dalam kategori tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2016) mengatakan bahwa apabiila tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengalami peningkatan, maka akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar, dkk. (2016) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi bagi penurunan tingkat kemiskinan suatu daerah.

Selain pertumbuhan ekonomi, faktor yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah yaitu adanya pendapatan asli daerah yang stabil. Pembangunan nasional membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Anggaran belanja tersebut didapatkan dari berbagai potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Menurut Pujiati (2008), dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan

PAD, akan memberikan peningkatkan komposisi PAD itu sendiri sebagai penerimaan daerah.

Namun mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Sidik dan Soewondo, 2001). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diklasifikasikan dalam 3 sumber, yaitu: Pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain penerimaan yang sah. Khusus mengenai pendapatan asli daerah dapat dikatakan bahwa peranannya atau sumbangannya terhadap keseluruhan APBD masih relatif kecil. PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada Tahun 2011-2018 menunjukkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menjadi perhatian khusus juga dikarenakan walaupun tingkat PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan, tetapi tingkat kemiskinan pada Provinsi Bali masih relatif tinggi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar anggaran belanja terutama dalam pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah maka semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat. Menurut Santosa (2013) menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan daerah. Semakin baik daerah dalam mengelola potensi daerahnya maka semakin tinggi pendapatan yang diterima sehingga daerah tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Arini dan Mustika (2015) menyatakan bahwa apabila suatu daerah memiliki PAD yang stabil dan tidak menurun, maka akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Dengan semangat perubahan paradigma tersebut, Pemerintah daerah diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri telah menempatkan mereka dalam keadaan di mana mereka mampu bertindak lebih baik, maka itu harus disertai dengan kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut baik dari segi finansial, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun kemampuan pengelolaan manajemen pemerintah daerah. Manusia, yang digambarkan sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan dengan

Selain PAD, upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan pendapatan (Yusuf dan Sumner, 2015).. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu dengan yang lain (Anggraini, 2013). Pembangunan pertumbuhan ekonomi atau sebagai sarana menuju peningkatan pembangunan manusia. UNDP mengungkapkan bahwa pembangunan manusia dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Walaupun keduanya tidak memiliki hubungan secara otomatis, namun apabila kedua hal tersebut disatukan pada satu kebijakan pembangunan yang searah, maka akan tercipta suatu kekuatan yang dapat saling mendorong untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia.

Kualitas dari sumber daya manusia memiliki peran yang paling utama dalam pembangunan ekonomi. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu kebutuhan dalam menghasilkan tatanan kehidupan masyarakat yang maju dalam berbagai bidang dan memiliki andil dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Manusia sebagai pelaku proses serta menjadi modal dalam pembangunan. Gagasan dasar pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia tetapi tidak hanya kesejahteraan ekonomi di mana manusia hidup. Namun, pembangunan harus lebih memperhatikan peningkatan kualitas hidup manusia. Menurut Sen (2001), pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir dari pembangunan . Analisis Sen sering disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Selama tahun 2011-2018 IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki kecendrungan meningkat. Dengan adanya peningkatkan IPM pada Provinsi Bali, seharusnya tingkat kemiskinan Provinsi Bali tidak mengalami fluktuasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Estrada dan Wenagama (2019) mengatakan bahwa apabila IPM suatu daerah meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Hasil yang sama juga pada penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah dan Malik (2017) yang mengatakan bahwa tingkat kemiskinan akan menurun apabila dalam suatu daerah memiliki tingkat IPM yang meningkat.

Perbedaan IPM antar Kabupaten/Kota tersebut tentu disebabkan oleh perbedaan sumberdaya yang dimilki oleh masing-masing daerah. Seperti diketahui bahwa IPM diukur berdasarkan dengan angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan paritas daya beli, maka pembangunan tiga aspek yang menjadi fokus perhatian dalam penghitungan IPM tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan sinergi diantara ketiganya (Rustariyuni, 2014). Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat guna memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Anand, 1993).

Melihat uraian tersebut, maka penanggulangan kemiskinan pada pembangunan manusia dan mengalokasikan potensi daerah melalui pertumbuhan ekonomi sangat menarik untuk diteliti IPM dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang khususnya terkait dengan masalah-masalah penanggulangan kemiskinan.

Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis pengaruh langsung indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, 2) menganalisis pengaruh langsung indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, 3) menganalisis pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh tidak langsung indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Dipilihnya lokasi ini, karena Bali sebagai daerah yang bergantung terhadap pariwisatanya harus mampu meningkatkan kualitas manusianya dengan mengalokasikan pendapatan asli daerah yang stabil di setiap Kabupaten/Kota provinsi Bali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan selama periode 2011-2018. Subjek dari penelitian ini adalah penduduk Provinsi Bali. Objek dalam penelitian ini adalah jumlah indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama periode 2011-2018. *Software* yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS dalam mengukur pengaruh indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Titik pengamatan dalam penelitian ini ada di Sembilan kabupaten/kota Provinsi Bali dalam rentang waktu 2011 hingga 2018 (8 tahun) maka besarnya ukuran sampel 9 x 8 = 72 pengamatan dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi non perilaku, yaitu observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau perusahaan dan hanya sebagai pengumpul data. Peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya (Arikunto, Suharsimi, 2006: 158).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *path analysis* atau analisis jalur.

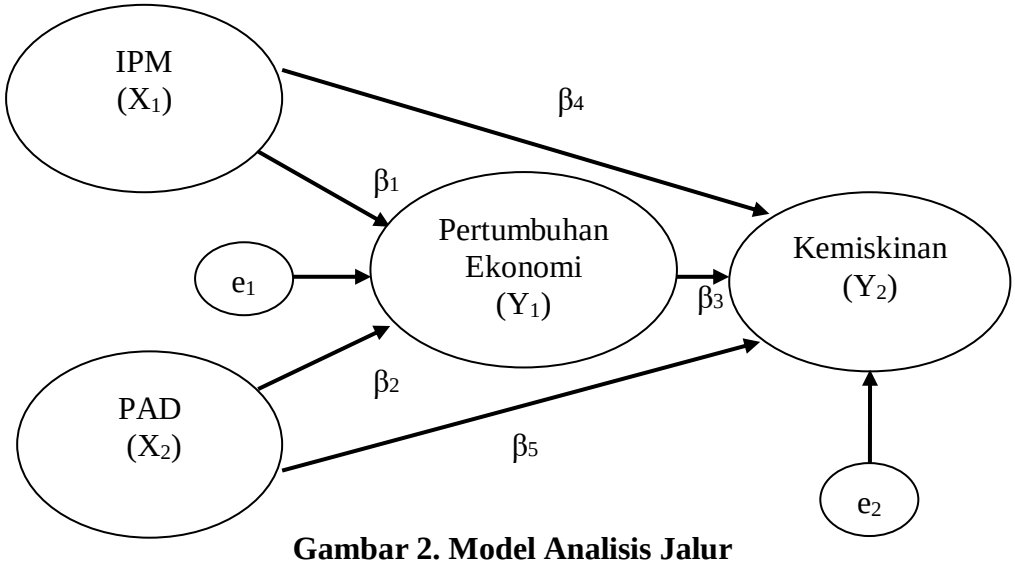

Gambar 2. Model Analisis Jalur

Gambar 2 menunjukkan bahwa pengaruh langsung IPM (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) ditunjukkan oleh anak panah dari X_1 ke Y_1 atau koefisien jalur β_1, pengaruh langsung PAD (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) ditunjukkan oleh anak panah X_2 dan Y_1 atau koefisien jalur β_2, pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi (Y_1) terhadap persentase kemiskinan (Y_2) ditunjukkan oleh anak panah dari Y_1 ke Y_2 atau koefisien jalur β_3, pengaruh langsung IPM (X_1) terhadap persentase kemiskinan (Y_2) ditunjukkan oleh anak panah dari X_1 ke Y_2 atau koefisien jalur β_4, pengaruh langsung PAD (X_2) terhadap kemiskinan (Y_2) ditunjukkan anak panah dari X_2 ke Y_2 atau koefisien jalur β_5, pengaruh tidak langsung IPM (X_1) terhadap persentase kemiskinan (Y_2) diperoleh dengan jalan mengalikan β_1 dengan β_3.

Total pengaruh tidak langsung IPM (X_1) terhadap persentase kemiskinan (Y_2) diperoleh dengan menjumlahkan pengaruh langsung dan tidak langsung, dan pengaruh tidak langsung PAD (X_2) terhadap persentase kemiskinan (Y_2) diperoleh dengan jalan mengalikan β_2 dengan β_3. Total pengaruh tidak langsung PAD (X_2) terhadap persentase kemiskinan (Y_2) diperoleh dengan menjumlahkan pengaruh langsung dan tidak langsung.

Nilai e_1 menuju variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) menunjukkan jumlah *variance* variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) yang tidak dijelaskan oleh IPM (X_1) dan PAD (X_2), dan nilai e_2 menuju persentase kemiskinan (Y_2) menunjukkan *variance* kemiskinan (Y_2) yang tidak dijelaskan oleh variabel IPM (X_1), PAD (X_2) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Persamaan struktural I : $Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1$..... (1)

Persamaan struktural II : $Y_2 = \beta_3 Y_1 + \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + e_2$..... (2)

Keterangan:

Y_1	= pertumbuhan ekonomi
Y_2	= kemiskinan
α	= konstanta
X_1	= IPM
X_2	= PAD
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= koefisien regresi untuk masing-masing variabel X dan Y
e_1, e_2	= *error*

Nilai kekeliruan taksiran standar (*standard error of estimate*), yaitu :

$e_1 = \sqrt{1 - R_1}^2$ .....(3)

$e_2 = \sqrt{1 - R_2}^2$ .....(4)

Untuk dapat memeriksa validitas modal, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut:

$R^2_m = 1 - (e_1)^2 (e_2)^2$ .....(5)

Keterangan:
R^2_m : Koefisien determinasi total
$(e_1)^2$ $(e_2)^2$: Nilai kekeliruan taksiran standar

Pengujian Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening dengan Uji Sobel

1) Pengaruh tidak langsung IPM (X_1) terhadap kemiskinan (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1) kabupaten/kota di Provinsi Bali. Menggunakan statistik uji yaitu:

$$S_{\beta 1\beta 3} = \sqrt{\beta_3^2 S\beta_1^2 + \beta_1^2 S\beta_3^2} \quad \text{.....(6)}$$

Keterangan :
$S\beta_1$ = standar *error* koefisien regresi variabel X_1 terhadap Y_1
$S\beta_3$ = standar *error* koefisien regresi variabel Y_1 terhadap Y_2

$$Z = \frac{\beta 1\beta 3}{s_{\beta 1\beta 3}} \quad \text{.....(7)}$$

Keterangan :
β_1 = Koefisien pengaruh variabel X_1 terhadap Y_1
β_7 = Koefisien pengaruh variabel Y_1 terhadap Y_2

2) Pengaruh tidak langsung PAD (X_2) terhadap kemiskinan (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1) kabupaten/kota di Provinsi Bali. Menggunakan statistik uji yaitu:

$$S_{\beta 2\beta 3} = \sqrt{\beta_3^2 S\beta_2^2 + \beta_2^2 S\beta_3^2} \quad \text{.....(8)}$$

Keterangan :
$S\beta_2$ = standar *error* koefisien regresi variabel X_2 terhadap Y_1
$S\beta_7$ = standar *error* koefisien regresi variabel Y_1 terhadap Y_2

$$Z = \frac{\beta 2\beta 3}{s_{\beta 2\beta 3}} \quad \text{.....(9)}$$

Keterangan :
β_2 = Koefisien pengaruh variabel X_2 terhadap Y_1
β_7 = Koefisien pengaruh variabel Y_1 terhadap Y_2

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian struktur pertama yaitu pengaruh IPM dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh IPM dan PAD secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pengujian dilakukan dengan SPSS versi 24. Menurut hasil olahan SPSS, maka laporan hasil analisis regresi adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Hasil Analisis Jalur Persamaan Regresi 1

Model	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,474	0,464		9,652	0,000
IPM (X_1)	0,009	0,003	0,454	3,545	0,001
PAD (X_2)	3,507E-11	0,000	0,059	0,457	0,649
R^2					0,240
F Hitung					10,910
Sig. F					0,000

Sumber: *Data sekunder, 2020*

Berdasarkan hasil analisis jalur pada Tabel 1, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut.

Y_1 = $0,454X_1 + 0,059X_2$
S(β) = (0,003) (0,000)
t = (3,545) (0,457)
Sig t = (0,001) (0,649)
R^2 = 0,240
F = 10,910
Sig F = 0,000

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient* beta sebesar 0,454 dan nilai probabilitas sebesar 0,001 < 0,05 ini berarti bahwa H_1 diterima. Berarti bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,059 dan nilai probabilitas sebesar 0,649 > 0,05 ini berarti bahwa H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

2) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan

Pengujian struktur kedua yaitu pengaruh indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi secara langsung terhadap kemiskinan, pengujian dilakukan dengan SPSS versi 24. Menurut hasil olahan SPSS, maka laporan hasil analisis regresi adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Hasil Analisis Jalur Persamaan Regresi 2

Model	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14,727	0,913		16,124	0,000
PE (Y_1)	-0,261	0,155	-0,090	-1,684	0,097
IPM (X_1)	-0,042	0,004	-0,733	-11,857	0,000
PAD (X_2)	-3,767E-10	0,000	-0,217	-3,816	0,000
R^2					0,852
F Hitung					130,986
Sig. F					0,000

Sumber: *Data sekunder, 2020*

Berdasarkan Tabel 2, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut.

Y_2 = $-0{,}090Y_1 - 0{,}733X_1 - 0{,}217X_2$
S(β) = (0,155) (0,004) (0,000)
t = (-1,684) (-11,857) (-3,816)
Sig t = (0,097) (0,000) (0,000)
R^2 = 0,852
F = 130,986
Sig F = 0,000

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,090 dan nilai probabilitas sebesar 0,097 > 0,05 ini berarti bahwa H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,733 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 ini berarti bahwa H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,217 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 ini berarti bahwa H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Untuk mengetahui nilai e_1 yang menunjukkan jumlah varian variabel pertumbuhan ekonomi yang tidak dijelaskan oleh variabel PAD dan IPM, dihitung menggunakan rumus:

$$e_1 = \sqrt{(1 - R^2)}$$

$$= \sqrt{(1 - 0{,}240) = 0{,}760}$$

Untuk mengetahui nilai e2 yang menunjukkan jumlah varian variabel kemiskinan yang tidak dijelaskan oleh variabel IPM, PAD dan pertumbuhan ekonomi, dihitung menggunakan rumus:

$$e_2 = \sqrt{(1 - R^2)}$$

$$= \sqrt{(1 - 0{,}852) = 0{,}148}$$

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total hasilnya yakni:

$R^2_m = 1 - (Pe_1)^2 (Pe_2)^2$

$= 1 - (0{,}760)^2 (0{,}148)^2$

$= 0{,}987$

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 0,987 artinya sebesar 98,7% variabel IPM, variabel PAD, variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 1,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Berikut merupakan gambar diagram hasil analisis jalur hasil penelitian ini.

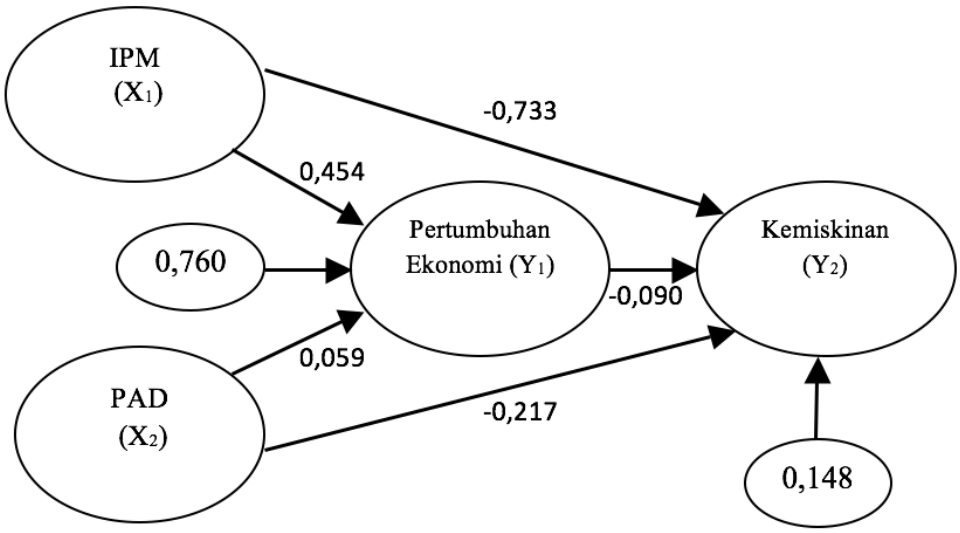

Gambar 3 Diagram Hasil Analisis Jalur

1) Pengaruh tidak langsung IPM (X_1) terhadap kemiskinan (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

$$S\beta1\beta3 = \sqrt{\beta32S\beta12 + \beta12S\beta32 + S\beta12S\beta32}$$

$$S\beta1\beta3 = \sqrt{(-0{,}090)2\ (0{,}003)2 + (0{,}454)2\ (0{,}155)2 + (0{,}003)2\ (0{,}155)2}$$

$$S\beta1\beta3 = 0{,}07037$$

Keterangan:
$S\beta_1$ = standar error koefisien regresi variabel indeks pembangunan manusia terhadap variabel pertumbuhan ekonomi
$S\beta_3$ = standar error koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel kemiskinan

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nila z dari koefisien $\beta_1\beta_3$ dengan rumus sebagai berikut.

$$z = \frac{\beta 1\beta 3}{S\beta 1\beta 3}$$

$$z = \frac{(0{,}454)(-0{,}090)}{0{,}07037}$$

$$z = -0{,}581$$

Keterangan:
β_1 = koefisien pengaruh variabel IPM terhadap variabel pertumbuhan ekonomi
β_3 = koefisien pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel kemiskinan

Nilai z hitung sebesar 0,581 lebih kecil dari 1,96 ini berarti pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel mediasi IPM terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel mediasi pengaruh IPM terhadap kemiskinan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Perkembangan IPM yang dikeluarkan oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali meningkat sehingga belum mampu menangani pertumbuhan ekonomi yang cenderung berfluktuasi yang akan berimbas pada penurunan kemiskinan. Sehingga tanpa adanya peningkatan dari pertumbuhan ekonomi, tidak akan mempengaruhi pengaruh IPM terhadap kemiskinan.

2) Pengaruh tidak langsung PAD (X_2) terhadap kemiskinan (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

$$S\beta 2\beta 3 = \sqrt{\beta 32S\beta 22 + \beta 22S\beta 32 + S\beta 22S\beta 32}$$

$$S\beta 2\beta 3 = \sqrt{(-0{,}090)2\ (0{,}000)2 + (0{,}059)2\ (0{,}155)2 + (0{,}000)2\ (0{,}155)2}$$

$$S\beta 2\beta 3 = 0{,}009145$$

Keterangan:
$S\beta_2$ = standar error koefisien regresi variabel PAD terhadap variabel pertumbuhan ekonomi
$S\beta_3$ = standar error koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel kemiskinan

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nila z dari koefisien $\beta_2\beta_3$ dengan rumus sebagai berikut.

$$z = \frac{\beta 2\beta 3}{S\beta 2\beta 3}$$

$$z = \frac{(-0{,}090)(0{,}059)}{0{,}009145}$$

$$z = -0{,}581$$

Keterangan:
β_2 = koefisien pengaruh variabel PAD terhadap variabel pertumbuhan ekonomi
β_3 = koefisien pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel kemiskinan

Nilai z hitung sebesar -0,581 lebih kecil dari 1,96 ini berarti pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel mediasi PAD terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel mediasi pengaruh IPM terhadap kemiskinan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. PAD di kabupaten/kota Provinsi Bali selalu mengalami kenaikan di mana satu daerah dengan daerah yang lain tidak mengalami pemerataan dalam sumber penghasilan,

sehingga pertumbuhan ekonomi yang selalu mengalami fluktuasi tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada Provinsi Bali. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi perantara dalam pengaruh PAD dalam menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Bali.

3) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil olahan data ditemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) yang menyatakan bahwa secara simultan indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Semakin baik capaian mutu modal manusia terkait IPM sebagai modal dalam pembangunan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi pun akan terwujud serta semakin meningkat.

Berdasarkan hasil olahan data ditemukan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hubungan positif dan tidak signifikan antara PAD terhadap pertumbuhan ekonomi didukung oleh penelitian Santosa (2013) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah pada 33 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh Sumartini dan Yasa (2015) yang mendukung PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Hasil ini mengindikasikan bahwa telah terjadi ketimpangan PAD antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, sehingga memengaruhi tingkat pertumbuhan

ekonomi antar daerah yang satu sisi memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sedangkan yang lainnya masih rendah. PAD secara umum berasal dari potensi daerah, sedangkan tidak semua daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki potensi yang besar (sektor pertambangan, kelautan, dan kehutanan), kemudian hanya dilandasi oleh penerimaan dari sektor pariwisata (dimana pariwisata daerah selatan lebih maju dibanding daerah utara) sehingga hasil penelitian ini mencerminkan timpangan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Tidak adanya relasi antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi dilandasi oleh tidak adanya kontra prestasi atau timbal balik yang seimbang antara tingkat penerimaan PAD dengan realisasi pemerintah dalam memaksimalkan layanan publik, sehingga tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan tidak mencapai target. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal akan memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

4) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil olahan data ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan berdasarkan studi yang dilakukan oleh Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018). Jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka tidak akan berdampak secara signifikan dalam pengurangan jumlah penduduk miskin selama periode tersebut. Apabila pertumbuhan ekonomi terjadi, pendapatan masyarakat miskin tidak mengalami perubahan yang dapat mengubah

pendapatannya di atas garis kemiskinan. Ini dikarenakan tidak tersebarnya dalam pendistribusian hasil pembangunan secara adil kepada seluruh wilayah, sehingga perekonomian yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang atau wilayah tertentu saja.

Berdasarkan hasil olahan data ditemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Samputra (2019) yang menyatakan bahwa Terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari peningkatan IPM terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Besarnya dampak IPM terhadap upaya penurunan tingkat kemiskinan, Sehingga dengan peningkatan kualitas manusia melalui pembangunan berbasis pengembangan dan peningkatan akses pendidikan, kesehatan serta dalam mendukung kehidupan yang lebih layak, dapat efektif menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa sumber daya manusia merupakan asset yang sangat penting bagi kemajuan suatu daerah. Sehingga bagi pemerintah daerah perlu mendorong dan menjamin peningkatan kualitas warganya dengan baik. Investasi yang tidak ternilai jika pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kualitas manusia di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan hasil olahan data ditemukan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2013) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan daerah, serta sesuai dengan Teori Hipotesis Kuznet. Peningkatan PAD

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada penelitian ini membuktikan meningkatnya PAD akan dapat menurunkan kemiskinan. Daerah sudah mampu mendistribusikan potensi daerah dengan baik sehingga jumlah penduduk miskin semakin menurun.

Tabel 3 Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Variabel Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y_1	
X_1-Y_1	0,454		0,454
X_2-Y_1	0,059		0,059
Y_1-Y_2	-0,090		-0,090
X_1-Y_2	-0,733	-0,041	-0,774
X_2-Y_2	-0,217	-0.005	-0,222

Sumber: *Data sekunder, 2020*

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yakni sebagai berikut. IPM bepengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. PAD tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan Ekonomi bukan sebagai variabel mediasi pengaruh IPM dan PAD terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang dipaparkan maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut.

1) Pemerintah Provinsi Bali diharapkan untuk lebih bijak lagi dalam memanfaatkan PAD dalam penyediaan infrastruktur ataupun sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga setiap daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tetap dan merata dengan daerah-daerah yang berkembang cepat. Pemerintah Provinsi Bali juga dapat lebih memaksimalkan pengalokasian penerimaan daerah sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang merata disetiap daerah.
2) Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dapat lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi disetiap daerah dengan merata agar dapat menanggulangi kemiskinan yang masih tinggi. Dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, diharapkan tingkat kemiskinan setiap daerah Provinsi Bali dapat diturunkan secara merata.
3) Para pihak swasta diharapkan dapat memeratakan penyaluran dana dalam membantu masyarakat untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dan masyarakat diharapkan dapat menggunakan dana yang diberikan oleh Pemerintah maupun pihak swasta dengan bijak dan dapat selalu mengembangkan usaha agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

REFERENSI

Abdullah, S., & Halim, A. 2004."Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali". *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25.

Adipuryanti, Y., & Sudibia, K. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerjam Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*. Vol. XI No. 1: 20 – 28.

Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti. 2008. Pertumbuhan Ekonomi Indoneisa:Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol 9(1): h:44-55.

Anand, Sudhir & Martin Ravallion. (1993). "Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services". *Journal of Ecoomic Perspectives*. Vol. 7. pp. 133-150.

Anggraini, Rinda, Ayun, dan Luthfi Muta'ali, 2013. Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. *Jurnal Bumi Indonesia*. Vol. 2, No. 3, hal. 233-242.

Anwar, M. L., Palar, S. W., & Sumual, J. L. 2016. Pengaruh DAU, DAK, PAD, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*,16(2), 218-232.

Arini., & Mustika, M. D. S. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali Tahun 2007-2013. *E-Jurnal EP Unud*, 4(9), 1140-1163.

Arisman. 2018. Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Volume 7 (1): 113 – 122.

Arka, Sudarsana. Yasa, Oka Antara. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol 8. No 1: 63-71.

Berwulo, L. L. D., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. 2017. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(1), 22-33.

Christy, F. A., & Adi, P. H. 2009. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Kualitas Pembangunan Manusia. *Jurnal National Conference UKWMS*, 10 Oktober Surabaya:Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Dewi, N. L. S., & Sutrisna, I. K. 2014. Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 3(3), 106-114.

Dewi, N. W. N., & Budhi, M. K. S. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud,* 4(11), 1391-1420.

Dollar, D. and Kraay, A. 2002. Growth is Good For The Poor. *Journal of Economic Growth* 7: 195–225.

Elizabeth, Stanton. 2007. The Human Development Index: A History. Global Development and Environment Institute. Tufts University. Number 127. Development Analysis. *Journal of the Operational Research*. 56, 969–980.

Escobaria, Diego Escobaria. Vacaflores, Diego E. 2015. Expectations and the Dynamic Feedback Between Foreign DirectInvestment and Economic Growth. *International Economic Journal*. Vol. 29, No. 1, 121–136.

Estrada, A. A. E., & Wenagama, I. W. 2019. Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal EP Unud,* 8(7), 1637-1665.

Fisanti, Atni. 2013. Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi PendapatanAsli Daerah (PAD) di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian*.

Hariawan, Peggy; Swaningrum, Ayu. 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.* Vol 8. No 1: 72-82.

Iskandar, Irham. 2017. Effect of Human Development Index Fund on Economic Growth Through a Special Autonomy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 18 (1), 40-49.

Jolianis. 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Journal Of Economic Education*, 4(2), 192-209.

Kpolovie. 2017. Continental Comparison of Human Development Index (HDI). *International Journal of Humanities Social Sciences and Education* (IJHSSE). Volume 4, Issue 1, pp. 9-27.

Kristyanto, Visi Saujaningati. 2018. Peningkatan Inklusivitas Ekonomi Melalui Pembiayaan Investasi Modal Manusia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 11 No. 2: 182-189.

Margareni, Ayu Purnama. Djayastra, Ketut. dan Yasa, Murjana. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Volume XII No. 1: 101-110.

Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009**.** *Economics Development Analysis Journal,* 1 (1).

Neumayer, Eric. 2001. The Human Development Index and Sustainability-A Constructive Proposal. *Ecological Economics*, 39 (1), pp. 101-114.

Nurmainah, S. 2013. Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE),* 20(2), 131-141.

Paul M. Romer. The Journal of Economic Perspectives Vol. 8, No. 1 (Winter, 1994), pp. 3-22.

Pradana, Ade Novid. Sumarsno, Hadi. Human Development Index, Capital Expenditure, Fiscal Desentralization to Economic Growth and Income Inequality in East Java Indonesia. *Quantitative Economics Research* Vol 1, No 2, 2018, pp. 108–118.

Prasetyoningrum, Ari Kristin. Sukmawati, U. Sulia. 2018. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengagguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 6 No: 2. pp. 217-240.

Priambodo, B. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal* ,3(3), 427-435.

Reza, Faizal. 2013. The Impact Of Education On Economic Growth In Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*. Volume 28, No 1, 23-44.

Robi Kurniawan & Shunsuke Managi. 2018. Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment. *Journal: Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 54. *issue* 3: 339-361.

Rustariyuni, Surya Dewi. 2014. "Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012". Jurnal PIRAMIDA ISSN: 1907-3275. 10 (1), 45-55.

Samputra, Palupi Lindiasari, Imam Munandar, Adis. 2019. Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, Dan Ipm Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.Vol. 12 No. 1: 35-46.

Siregar, Baldric. Pratiwi, Nurna. 2017. The Effect Of Local Government Characteristics And Financial Independence On Economic Growth And Human Development Index In Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. Vol.19, NO. 2: 65–71.

Solow, Robert. M., 1957. "Technical Change and The Aggregate Production Function." *The Review of Economics and Statistics.* Vol. 39, No. 3, Agustus 1957, hal. 312-320.

Suartha, Nyoman, & Yasa, I. G. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 17* , 95-107. Retrieved Juli 29, 2017.

Sulistyowati, Niken. Marulitua, Bonar. Novindra, Sinaga. 2017. Impact of Goverment and Household Expenditure on Human Development Index. *Journal of Economics and Policy*.Vol 10: 412-428.

Suryahadi, Asep. Hadiwidjaja, Gracia. Sumarto, Sudarno. 2012. Economic Growth And Poverty Reduction Inindonesia Before And After The Asian Financialcrisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 48, No. 2: 209-227.

Vincent, Brian. 2009. *The Concept'Poverty towards Understanding in The Context of Development*. 2(2).

Yusuf dan Sumner. 2015. Growth, Proverty, and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51: 3, 323-348.